



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Rabu 26 Maret 2025



RINGKASAN BERITA HARI INI



Mahasiswa Sidoarjo dan Gresik Tolak Revisi UU TNI

Berencana Ajukan
Judicial Review ke MK

SIDOARJO - Gelombang demonstrasi menolak pengesahan perubahan Undang-undang TNI sampai ke Sidoarjo dan Gresik. Aksi massa yang dimotori mahasiswa itu mengkritik tajam pengesahan UU itu karena dinilai mencederai aspirasi rakyat. Mereka berencana untuk mengajukan judicial review UU itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Kemarin (25/3) siang, ratusan massa dari aliansi mahasiswa di Sidoarjo merujuk rasa di gedung DPRD Sidoarjo. Mereka menggelar teatrikal, membakar ban, melempar petasan, serta telur busuk ke arah gerbang gedung dewan.

Bozza Mahasiswa... Hal 19

Cek Kesehatan Gratis Buka saat Lebaran

SIDOARJO - Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Sidoarjo tetap berlangsung meski saat masa libur Lebaran. Warga dapat memanfaatkan layanan ini di puskesmas.

Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Sidoarjo dr. Daniang Abdul Ghani mengatakan, CKG terus berjalan selaras dengan puskesmas yang tetap buka di libur lebaran. "Ada 31 puskesmas siap melayani CKG saat lebaran nanti," katanya kemarin (25/3).

Danang mengungkapkan, layanan CKG tidak harus dilakukan saat warga ulang tahun. "Sebelumnya kan harus ulang tahun, sekarang

walaupun tidak ulang tahun bisa langsung CKG," katanya.

Sehingga, meski belum ulang tahun, atau sudah lewat jauh dari tanggal ulang tahun, tetap bisa langsung datang ke Puskesmas. "Karena kadang kan pas ulang tahun sedang sibuk atau tidak sempat. Jadi bisa jauh hari sebelumnya atau sesudahnya," ungkapnya.

Sementara itu, data hingga pekan keempat ini, jumlah pendaftar CKG melonjak drastis. Akhir Februari lalu ada 2.250, kini bertambah menjadi 8.129 orang. Kehadiran juga mengalami lonjakan signifikan. (eza/uzi)



BISA SEWAKTU-WAKTU: Dwi Candra (dua dari kiri) melakukan pemeriksaan tumbuh kembang anak di Puskesmas Sidoarjo kemarin (25/3).

Sejak pukul 10.00, Organisasi Cipayung dan Aliansi Mahasiswa Sidoarjo beraksi di depan kantor DPRD hingga melakukan pembakaran ban bekas dan menyalaikan petasan hingga merangsek dan menuntut untuk masuk ke dalam gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo.



Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdullah Nasih menerima pendemo dari Organisasi Cipayung dan Aliansi Mahasiswa Sidoarjo dengan mendengarkan dan bersedia menandatangani surat tuntutan dari mahasiswa.

Pukul 15.40, ratusan mahasiswa bisa masuk ke halaman kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo dan diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdullah Nasih didampingi oleh Komisi D Zahrul Yusaar dan Komisi C Muht. Zakaria Dimas Pratama. Di depan Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Korlap Organisasi Cipayung dan Aliansi Mahasiswa Sidoarjo Farhan mengatakan tuntutan mereka, ada dua tuntutan yaitu tuntutan masalah nasional dan tuntutan masalah lokal Sidoarjo.

"Ada 7 tuntutan masalah nasional, antara lain kami menolak pengesahan UU TNI yang melegitimasi peran TNI di ruang sipil, menuntut DPR untuk segera mempublikasikan naskah pengesahan RUU TNI, menuntut pengesahan RUU perampasan aset," ujar Farhan yang membacakan tujuh tuntutan Organisasi Cipayung dan Aliansi Mahasiswa Sidoarjo sambil duduk lesehan bersama Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo di halaman Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo.

KILAS DELTA



CEK KELAYAKAN: Staf Terminal Purabaya memeriksa kondisi bus yang akan mengangkut penumpang kemarin (25/3).

Jelang Idul Fitri, Petugas Periksa 80 Bus Sehari

SIDOARJO - Pengelola Terminal Purabaya meningkatkan intensitas pemeriksaan bus menjelang Lebaran. Tujuannya, memastikan kelayakan armada yang akan membawa penumpang. Hasilnya, hingga saat ini petugas menemukan 64 pelanggaran kategori ringan.

Bentuk pelanggaran yang ditemukan beragam. Misalnya, alat pemecah kaca kurang, tidak ada alat pemadam ringan, dan sejumlah lampu di dalam armada tidak menyala. "Kami ingatkan awak bus agar melengkapi dan membenahi," kata Kepala Pengawas Satpel Terminal Purabaya Ahmad Badik kemarin (25/3).

Badik menuturkan, pemeriksaan yang dilakukan mencakup dua aspek, yakni administrasi dan teknis. Kegiatan yang dilakukan secara acak itu sebenarnya kegiatan rutin. Hanya saja sasaran ditingkatkan menjelang Lebaran. Dari biasanya 40 bus menjadi 80 bus dalam sehari. (edi/uzi)

**Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan
Sekretariat DPRD Sidoarjo**

Pemkab Dukung Operasi Ketupat Semeru 2025

SIDOARJO (BM) - Sebanyak 565 personel gabungan akan diterjunkan untuk mengamankan arus mudik Lebaran tahun ini. Di antaranya anggota Polresta Sidoarjo, anggota Kodim 0816 Sidoarjo serta Satpol PP Sidoarjo dan Dishub Sidoarjo.

Operasi Ketupat Semeru 2025 digelar mulai 23 Maret 2025 hingga 8 April 2025. Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Semeru 2025 digelar Polresta Sidoarjo, Kamis (20/3).

Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing mengatakan akan ada 1 pos pelayanan dan 8 pos pengamanan yang akan dibangun di beberapa titik. Personil gabungan akan ditempatkan di masing-masing pos.

Setiap pos juga akan ditempatkan mobil ambulance, mobil derek dan mobil pemadam kebakaran. Hal tersebut sebagai langkah antisipasi akan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

"Kegiatan Operasi Ketupat Semeru 2025 ini mengambil tagline Mudik Aman Keluarga Nyaman, dengan tagline ini kami akan menjaga masyarakat yang melaksanakan mudik lebaran," ucapnya.

Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing juga mengatakan antisipasi jalan rawan kecelakaan akan dilakukan. Dilokasi tersebut akan didirikan pos serta personil dan penambahan papan himbauan. Terkait hal itu sudah ia komunikasikan dan koordinasikan dengan Dishub Sidoarjo.

"Kita sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Perhubungan Sidoarjo, akan ada penambahan papan himbauan kemudian ada penambahan papan penunjuk serta penempatan pos dan personil untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas," ucapnya.

Selain itu, Polresta Sidoarjo juga akan melakukan pengamanan terhadap objek vital serta tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan. Anggotanya juga akan melakukan kegiatan patroli terhadap rumah-rumah warga yang ditinggal mudik. Polresta Sidoarjo juga akan membuka tempat penitipan kendaraan masyarakat yang ditinggal mudik. "Kita juga akan menjaga objek-objek vital serta menjaga tempat-tempat keramaian seperti mal-mal," ucapnya.

Dalam kesempatan itu ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan call center 110 jika ada permasalahan saat mudik. Ia akan langsung terjunkan personil jika ada pengaduan ataupun laporan yang masuk pada call center 110. "Jika ada hal-hal yang perlu dilaporkan, kami akan langsung menerjunkan personil untuk menanganinya," ujarnya. (udi)



BMST

GELAR PASUKAN: Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Semeru 2025 digelar Polresta Sidoarjo, Kamis (20/3).



BM/ST

SIDAK: Bupati Sidoarjo, Subandi melakukan inspeksi mendadak (sidak) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tiga desa sekaligus, Minggu (23/3).

Sidak Tiga RTLH, Bupati Sidoarjo Pastikan Pemkab Siap Bedah Rumah Warga Miskin di Kecamatan di Kota

SIDOARJO (BM) - Pemerinrah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memastikan siap bedah rumah warga miskin di wilatan Kecamaran Kota Sidoarjo.

Kepastian iri diungkapkan Bupati Sidoarjo, Subandi selesanya melakukan inspeksi mendadak (sidak) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tiga desa sekaligus, Minggu (23/3). Ketiga RTLH itu berada di Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Desa Grogol, Kecamatan Tulangan dan Desa Karangpuri, Kecamatan Wonoayu.

Ketiga rumah warga yang menjadi sasaran sidak ini di antaranya, rumah Amianto (59) hidup dengan suami yang bekerja serabutan, rumah Julaikha (48) yang ditinggal suaminya dan hidup dengan seorang putra berkebutuhan khusus

dan rumah Rifqi (22) yang hidup sebatang kara di rumah tidak layak huni.

Dalam Sidak ini, Subandi didampingi Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Churdlori, Dinas Sosial (Dinsos), Baznas Sidoarjo dan jajaran forkopimka.

Dalam kunjungannya, Subandi menemukan kondisi rumah yang tidak layak huni. Yakni atap rumah terlihat bocor serta tembok dan kayu penyangganya mulai keropos. Melihat kondisi ini, Subandi memastikan rumah Rifqi akan segera direnovasi agar menjadi hunian yang lebih layak.

Sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah, Subandi berjanji membedakan rumah itu dengan menggandeng Badan Amil

Zakat Nasional (Baznas). Renovasi direncanakan akan dilaksanakan setelah lebaran tahun ini. "Pascalebaran, dengan menggandeng Baznas, kita akan membedakan rumah milik Rifqi ini agar menjadi hunian yang layak," ujar Subandi, Minggu (23/3).

Selain memperhatikan kondisi rumah, Subandi juga meninjau kamar mandi yang dinilai tidak layak dan tidak sehat. Subandi berjanji akan memperbaiki kamar mandinya. Semua itu dilakukan demi menjaga kesehatan penghuni rumah.

"Kamar mandi rumah juga kita temukan dalam kondisi tidak layak. Kita akan benahi agar penghuni rumah ini tetap sehat," imbuh mantan Kades Pabean, Kecamatan Sedati ini. (adv/udi)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Sidoarjo Sediakan Rp70 Miliar untuk THR Pegawai

Sidoarjo, Bhirawa

Pemkab Sidoarjo mengalokasikan anggaran sebesar Rp70 an miliar untuk kebutuhan tunjangan hari raya (THR) bagi sekitar 13.000 an pegawai. Mulai dari PNS, PPPK dan Non ASN.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BP-KAD) Kabupaten Sidoarjo, Khusnul Inayah, menyampaikan pencairan THR gaji, pertama pada Jum at, 21 Maret lalu.

“Pada hari ini, pencairan untuk THR yang kedua, yang sesuai PP 11,” yakni tunjangan kinerja,” jelasnya, Selasa (25/3) kemarin, ditemui di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo.

Pencairan THR yang sesuai PP 11 ini, lanjut Khusnul, tiap daerah berbeda-beda. Tergantung pada kemampuan keuangan daerah setempat.

Khusnul membuat rincian, bila pencairan THR yang pertama, alokasinya sebesar Rp60 miliar, sedangkan THR kedua, sesuai PP 11, sebesar Rp13 miliar.

Menurut Khusnul Inayah semua pegawai di Pemkab Sidoarjo mendapatkan THR. Alokasi dana untuk THR pada tahun 2025 ini, menurut Khusnul, hampir sama dengan tahun 2024 lalu. [kus.dre]

HARIAN
Bhirawa
Biru Daging Biru Merah

630 Honorer Kabupaten Sidoarjo Lolos Tes PPPK Gelombang I

Sidoarjo, Bhirawa

Sebanyak 630 orang honorer di Pemkab Sidoarjo berhasil lolos dalam tes gelombang I, tenaga PPPK di tahun 2025 ini. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo, Budi Basuki ST MMT, menyampaikan saat ini pihaknya dalam proses pengusulan nomor induk (NI) PPPK di Kantor Regional 2 BAKN Surabaya.

"Pemberkasan syarat administrasi sudah selesai, saat ini tinggal menunggu NIP PPPK turun," kata Budi, Selasa (25/3) kemarin. OPD mana PPPK nya banyak yang lolos? Budi hanya mengatakan setiap OPD ada PPPK nya yang lolos.

Dirinya mengatakan tidak bisa menyebut satu persatu. Namun yang jelas, tenaga guru dan tenaga kesehatan, termasuk PPPK yang paling banyak. Setelah tes gelombang I, sebentar lagi akan disusul dengan tes gelombang 2.

"Pelaksanaan tes, akan dilangsungkan antara Bulan April hingga Mei 2025," kata Budi. Jumlah quota yang ingin didapat pada seleksi PPPK gelombang 2 tahun 2025 ini, menurut Budi, adalah sebanyak 535 orang.

Sesuai jadwal dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), pendaftaran sudah dimulai pada 24 November



ali kusyanto/bhirawa

Kegiatan tes PPPK gelombang I di Pemkab Sidoarjo.

2024 hingga Mei 2025. Kemudian seleksi administrasinya, 16 Desember 2024 hingga 8 Februari 2025.

"Untuk pengumuman hasil lulus, 22 hingga 31 Mei 2025. Dan penetapan NI PPPK, tanggal 1 hingga 31 Juli 2025," kata Budi.

Kepala BPKAD Sidoarjo, Khusnul Inayah, menyampaikan be-

lanja kebutuhan pegawai di Pemkab Sidoarjo, selama ini masih dibawah dari mandatory spending 30 persen.

Misalnya pada tahun 2023, sebesar 27 persen, tahun 2024 sebesar 28.9 persen dan tahun 2025 sebesar 28.74 persen. Meskipun demikian, diantara belanja

lainnya, belanja pegawai di Kabupaten Sidoarjo ini masih termasuk paling mendominasi.

Menurut salah satu honorer yang lolos tes PPPK gelombang I, Suyatno, dirinya sudah menjadi honorer sejak 23 tahun lalu. Dirinya pernah ikut tes PNS pada tahun 2013 lalu, namun gagal. [kus.dre]

Sekda Sampang Buka Bazar Murah Ramadan Bersama Bank Jatim

Sampang, Bhirawa

Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiyawan, S.Sos., M.M., secara resmi membuka Bazar Murah Ramadan Kareem Tahun 1446 Hijriyah di halaman kantor Bank Jatim Cabang Sampang.

"Pelaksanaan bazar murah ini dilaksanakan serentak oleh Bank Jatim di 41 cabang Bank Jatim di Jawa Timur mulai tanggal 24-26 Maret 2025 dengan memberdayakan UMKM lokal," ujar Ibu Erny.

Beliau juga menekankan bahwa bazar murah ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendukung perekonomian lokal.

HARIAN
Bhirawa
Buku Saku Bhirawa

RSUD Notopuro Sidoarjo Tepis Isu Pengangkatan Dewan Pengawas

Sidoarjo, Bhirawa

Plt Dirut RSUD Notopuro Sidoarjo, dr Atok Irawan SpP, mengklarifikasi kabar miring yang beredar tentang pengangkatan Mulyono Wijayanto, sebagai anggota Dewan Pengawas (Dewas) RSUD RT Notopuro Sidoarjo.

Mulyono Wijayanto, jelas dr Atok Irawan, diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas RSUD sejak bulan Juni 2024 lalu. Pengangkatan ini, jauh sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sidoarjo tahun 2024 lalu.

“Jadi, posisi itu tidak terkait faktor politis atau balas jasa politik,” jelas dr Atok Irawan, Senin (24/3) kemarin, yang mengklarifikasi isu terkait pengangkatan Dewas RSUD Notopuro terkait politik balas budi.

Dr Atok Irawan memastikan, kalau posisi Mulyono Wijayanto tidak terkait politik, pemilihannya sebagai anggota Dewas RSUD Notopuro, sudah sesuai ketentuan. Mulyono, dipilih menjadi anggota



*Mengukur Prestasi,
Memahat Inspira*

Plt Dirut RSUD Notopuro Sidoarjo, dr Atok Irawan SpP. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Sidoarjo.

“Pengalaman dan pengabdian Mulyono Wijayanto itu, dianggap sangat membantu. Mulyono mampu menjadi jembatan antara kebijakan kesehatan dan realitas kebutuhan layanan kesehatan di masyarakat. Keterlibatan Mulyono kita harapkan dapat memberikan perspektif baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Notopuro kepada masyarakat,” kata dr Atok.

Dokter spesialis paru ini menjelaskan, sejak Mulyono bergabung sebagai Dewan Pengawas, RSUD Notopuro bisa lebih me

diptim menjadi anggota Dewas RSUD Notopuro, pertimbangan utama karena dikenal luas di masyarakat, sebagai Ketua Paguyuban

Notopuro bisa lebih memahami dan menentukan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan realitas di lapangan. [kus.fen]

HARIAN
Bhirawa

Teken MoU dengan CWI

Pemkab Kelola Sampah TPA Jabon Jadi Sumber Energi

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo merealisasikan kerjasama pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Griyo Mulyo, Jabon, dengan China Water Industry (CWI) Group Limited.

Perusahaan asal Tiongkok itu akan mengolah tumpukan sampah di TPA Jabon untuk menghasilkan gas metana yang akan diubah menjadi energi listrik. Sebagai langkah awal, CWI Group Limited akan melakukan studi kelayakan atau Feasibility Study (FS) sistem Landfill Gas to Energy (LFG) di TPA Griyo Mulyo.

Menandai kerjasama tersebut Pemkab Sidoarjo dan CWI Group Limited sepakat melakukan MoU (Memorandum of Understanding) di pendopo Delta Wibawa, Senin kemarin, (24/3/25).

Penandatanganan dilakukan Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana mewakili Bupati Sidoarjo dengan Direktur CWI Group Limited Huang Jian Jian. MoU disaksikan Deputi Sistem Nasional Dewan Ketahanan Nasional RI Mayjen TNI DR. Tri Yuniarto serta Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati dan kepala OPD Sidoarjo terkait.



Mou Pemkab Sidoarjo, Wabup Mimik Idayana teken MoU dengan CWI pengelolaan TPA Jabon

Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana menyambut baik kerjasama tersebut. Dikatakannya Pemkab Sidoarjo terus berupaya mencari solusi inovatif dalam pengelolaan sampah. Ia melihat China memiliki teknologi pengelolaan sampah yang inovatif. Ia ingin teknologi seperti itu dapat diterapkan di Kabupaten Sidoarjo.

"Saya melihat China itu luar

biasa dalam mengelola sampahnya, mudah-mudahan ini dapat diterapkan di Kabupaten Sidoarjo," ucapnya.

Wabup Hj. Mimik Idayana mengatakan sampah masih menjadi problem tersendiri bagi Kabupaten Sidoarjo. Oleh karenanya permasalahan sampah menjadi perhatian khusus Pemkab Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo ingin ada

inovasi dalam pengelolaan sampah. Bahkan pengelolaan sampah bisa berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Sampah masih menjadi problem bagi kami, mudah-mudahan setelah MoU ini nanti, pengelolaan sampah di Sidoarjo semakin baik kedepannya," harapnya.

Deputi Sistem Nasional Dewan Ketahanan Nasional RI Mayjen TNI Tri Yuniarto yang hadir mendampingi CWI Group Limited berharap sistem LFG di TPA Griyo Mulyo Jabon segera dibangun setelah FS dilakukan.

Untuk itu ia meminta dukungan Pemkab Sidoarjo dalam membantu proses pembuatan FS yang akan dilakukan CWI Group Limited. Disampaikannya tim teknis sudah melakukan peninjauan berulang kali pada TPA Griyo Mulyo Jabon. Dari peninjauan itu diyakini banyak gas metana terkandung dalam timbunan sampah tersebut.

"Di dalam kandungan sampah yang lama, bukan yang baru karena di Jabon itu ada dua, ada space satu ada space dua, space dua betul sanitary landfill, tapi space yang lama itu kan belum, itu yang akan kita kelola," ucapnya.

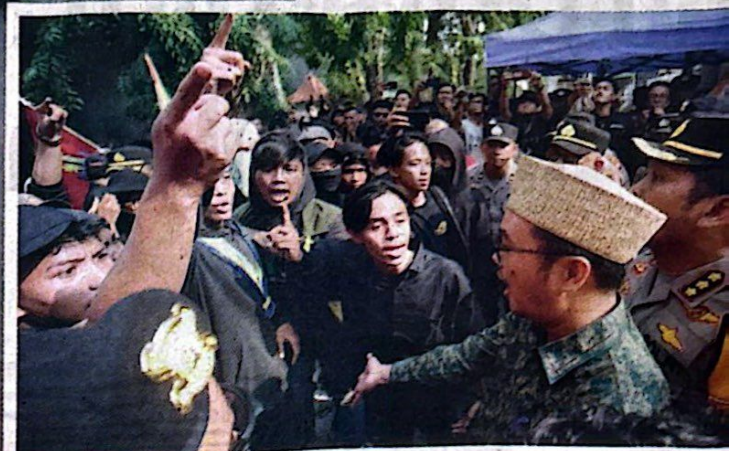
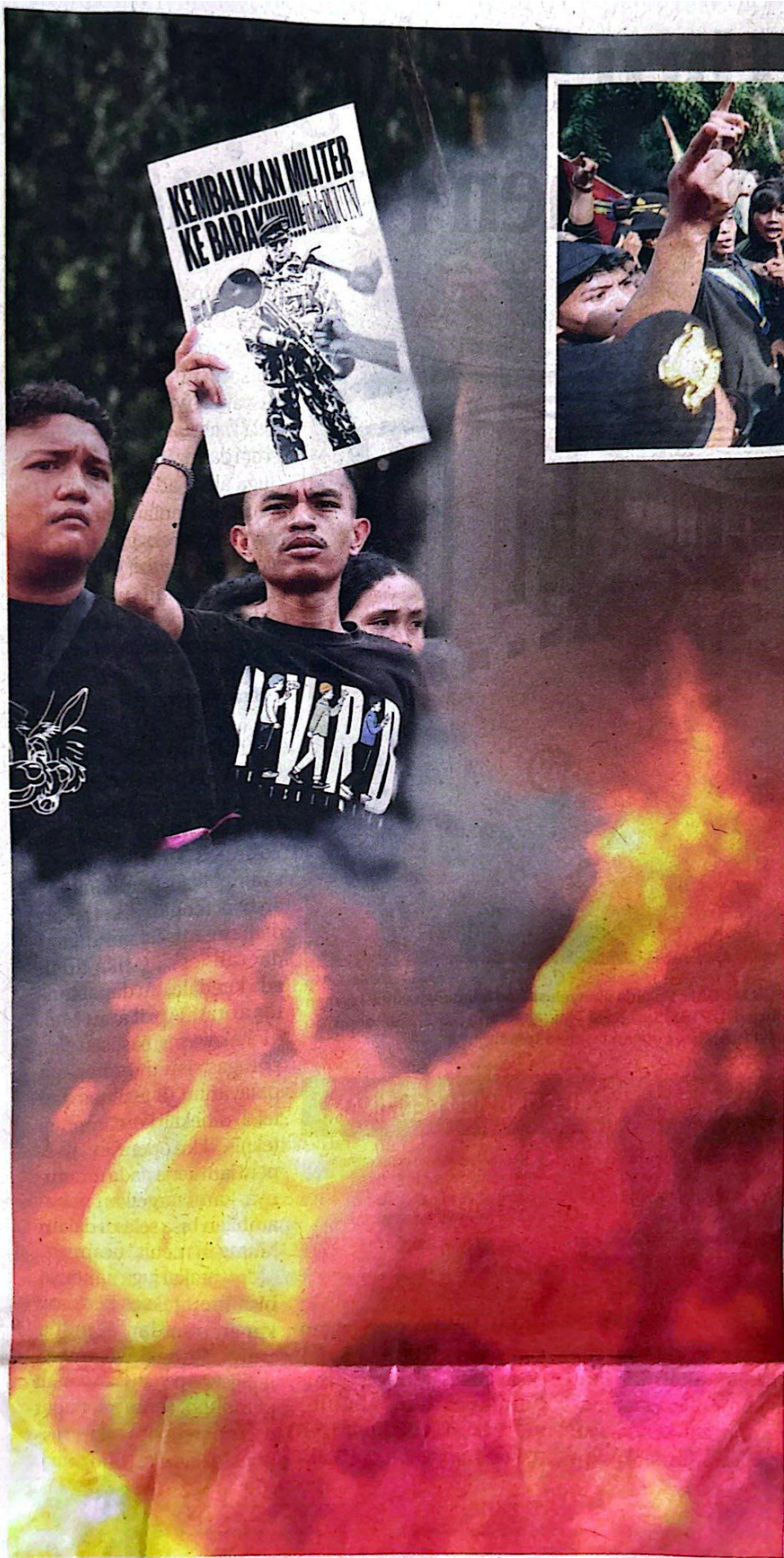
Mayjen TNI Tri Yuniarto mengatakan pembangunan sistem LFG di TPA Griyo Mulyo Jabon tidak menggunakan APBD Sidoarjo. Semua biaya dikeluarkan CWI Group Limited. Ia melihat lokasi TPA Griyo Mulyo Jabon sangat mendukung pembangunan sistem LFG.

Dikatakannya, selain di Kabupaten Sidoarjo, pembangunan sistem LFG juga akan dilakukan di daerah Malang, Semarang dan Kota Serang.

"Harapan kami, China Water Industry ini bisa membangun instalasi utuh yang pertama kali dibangun di Sidoarjo, dan ini akan menjadi contoh beberapa kota dan kabupaten lainnya," ucapnya.

Mayjen TNI Tri Yuniarto juga mengatakan pemerintahan sebelum dan saat ini sudah menekankan pengelolaan sampah. Dikatakannya Indonesia sudah darurat sampah. Padahal tahun 2045, pemerintah sudah berkomitmen untuk zero waste atau bebas sampah dan tidak ada lagi open dumping dan pembakaran sampah. Hal tersebut menurutnya menjadi tantangan berat. Namun ia yakin tidak ada yang tidak mungkin jika dikerjakan bersama-sama. ● **Loe**

DUTA



ANGGER BONDAN/JAWA POS

Mahasiswa Sidoarjo dan Gresik Tolak Revisi UU TNI

Berencana Ajukan
Judicial Review ke MK

SIDOARJO - Gelombang demonstrasi menolak pengesahan perubahan Undang-undang TNI sampai ke Sidoarjo dan Gresik. Aksi massa yang dimotori mahasiswa itu mengkritik tajam pengesahan UU itu karena dinilai mencederai aspirasi rakyat. Mereka berencana untuk mengajukan *judicial review* UU itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kemarin (25/3) siang, ratusan massa dari aliansi mahasiswa di Sidoarjo merunjuk rasa di gedung DPRD Sidoarjo. Mereka menggelar teatrikal, membakar ban, melempar petasan, serta telur busuk ke arah gerbang gedung dewan ■

► Baca Mahasiswa... Hal 19

MEMANAS: Ban dibakar di depan kantor DPRD Sidoarjo pada demo Aliansi Mahasiswa Sidoarjo yang menolak pengesahan revisi UU TNI, kemarin (25/3). Foto kanan, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih (dua dari kanan) menemui demonstran.

ANGGER BONDAN/JAWA POS

Jawa Pos



ANGGER BONDAN/JAWA POS

TERHALANG: Pengendara motor melintas di frontage road (FR) Buduran kemarin (25/3). Masih terdapat satu rumah yang belum dibongkar di badan jalan FR.

Pembukaan Frontage Road Buduran Tunggu Pembongkaran Satu Rumah

SIDOARJO - *Frontage road* (FR) yang masuk wilayah Buduran masih belum bisa digunakan saat Lebaran nanti. Penyebabnya, ada satu rumah yang belum dibongkar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptono

mengatakan, pihaknya masih perlu melakukan sejumlah pengerjaan tambahan sebelum nantinya dibuka untuk umum.

"Belum dibuka sekarang, kondisi jalannya juga belum siap," katanya kemarin (25/3). Dwi mengatakan masih ada pengerjaan pengerasan jalan. Sehingga,

jalan tidak mudah rusak saat dilalui.

Saat ini, FR Buduran sudah selesai diaspal hingga di Desa Siwalanpanji. Akses jalan baru akan dibuka selepas pengerasan aspal jalan selesai.

Selain itu, masih ada satu rumah di ruas FR yang masuk Desa Banjarkemantren yang belum dibongkar. "Itu

sudah dibebaskan, tinggal dibongkar," katanya.

Mengenai kapan pembongkarannya, Dwi menyebut dalam waktu dekat. Belum dibukanya FR Buduran itu membuat sejumlah kendaraan dari arah FR Gedangan harus belok ke kanan masuk ke Jalan Raya Buduran. (eza/uzi)

Jawa Pos

Cek Kesehatan Gratis Buka saat Lebaran

SIDOARJO – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Sidoarjo tetap berlangsung meski saat masa libur Lebaran. Warga dapat memanfaatkan layanan ini di puskesmas.

Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Sidoarjo dr. Danang Abdul Ghani mengatakan, CKG terus berjalan selaras dengan puskesmas yang tetap buka di libur lebaran. "Ada 31 puskesmas siap melayani CKG saat lebaran nanti," katanya kemarin (25/3).

Danang mengungkapkan, layanan CKG tidak harus dilakukan saat warga ulang tahun. "Sebelumnya kan harus ulang tahun, sekarang

walaupun tidak ulang tahun bisa langsung CKG," katanya.

Sehingga, meski belum ulang tahun, atau sudah lewat jauh dari tanggal ulang tahun, tetap bisa langsung datang ke Puskesmas. "Karena kadang kan pas ulang tahun sedang sibuk atau tidak sempat. Jadi bisa jauh hari sebelumnya atau sesudahnya," ungkapnya.

Sementara itu, data hingga pekan keempat ini, jumlah pendaftar CKG melonjak drastis. Akhir Februari lalu ada 2.250, kini bertambah menjadi 8.129 orang. Kehadiran juga mengalami lonjakan signifikan. (eza/uzi)





ANGGER BONDAN/JAWA POS

BISA SEWAKTU-WAKTU: Dwi Candra (dua dari kiri) melakukan pemeriksaan tumbuh kembang anak di Puskesmas Sidoarjo kemarin (25/3).

Jawa Pos

KILAS DELTA



SATPEL TERMINAL PURABAYA

CEK KELAYAKAN: Staf Terminal Purabaya memeriksa kondisi bus yang akan mengangkut penumpang kemarin (25/3).

Jelang Idul Fitri, Petugas Periksa 80 Bus Sehari

SIDOARJO - Pengelola Terminal Purabaya meningkatkan intensitas pemeriksaan bus menjelang Lebaran. Tujuannya, memastikan kelayakan armada yang akan membawa penumpang. Hasilnya, hingga saat ini petugas menemukan 64 pelanggaran kategori ringan.

Bentuk pelanggaran yang ditemukan beragam. Misalnya, alat pemecah kaca kurang, tidak ada alat pemadam ringan, dan sejumlah lampu di dalam armada tidak menyala. "Kami ingatkan awak bus agar melengkapi dan membenahi,"

kata Kepala Pengawas Satpel Terminal Purabaya Ahmad Badik kemarin (25/3).

Badik menuturkan, pemeriksaan yang dilakukan mencakup dua aspek, yakni administrasi dan teknis. Kegiatan yang dilakukan secara acak itu sebenarnya kegiatan rutin. Hanya saja sasaran ditingkatkan menjelang Lebaran. Dari biasanya 40 bus menjadi 80 bus dalam sehari. (edi/uzi)

Jawa Pos



Reskrim Polresta Sidoarjo Ungkap Peredaran Upal

Sidoarjo, Memorandum

Tiga pria dan satu wanita diamankan polisi. Mereka; S dan AY, asal Bangil, Pasuruan, SBU asal Tanggulangin dan TC asal Pandaan, Pasuruan. Mereka berurusan dengan polisi karena peredaran uang palsu (upal).

Pengungkapan uang palsu di wilayah hukum Polresta Sidoarjo ini bermula dari laporan masyarakat. Pada 20 Februari 2025 tersangka S melakukan transaksi pembayaran KUR di sebuah toko di Desa Pamotan, Porong, menggunakan enam lembar Rp100.000.

Pemilik toko curiga uang yang diserahkan S adalah palsu. Sehingga uang tidak diterima. Selanjutnya lapor ke Polsek Porong beserta bukti rekaman CCTV di tokonya.

Berdasarkan informasi tersebut, anggota Unit Reskrim Polsek Porong dengan diback up Unit Pidum Satreskrim Polresta Sido-



Polisi merilis ungkap uang palsu.

arjo, melakukan penyelidikan. Hasilnya pada 27 Februari 2025 siang tersangka S dan tersangka AY diamankan di tempat kos di Porong.

"Pada saat penggeledahan di tempat kos pelaku S dan AY ditemukan barang bukti berupa 40 lembar uang kertas pecahan Rp100.000 tahun emisi 2016, ada 68 lembar uang kertas pecahan Rp50.000 tahun emisi 2022," kata

Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing, Senin (24/3).

Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui uang yang diduga palsu tersebut didapatkan dari tersangka TC alias MJ dan uang yang diduga palsu didapatkan dari tersangka SBU.

Dari keterangan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Unit Reskrim Polsek Porong dengan

diback up Satreskrim Polresta Sidoarjo. Alhasil polisi melakukan penangkapan terhadap tersangka TC alias MJ pada 27 Februari 2025 di tempat kos di Gempol, Pasuruan. Kemudian tersangka SBU ditangkap pada hari yang sama di rumahnya di Tanggulangin, Sidoarjo.

Pengakuan para tersangka mereka mendapatkan uang palsu dari seorang bernama Abah Soleh (DPO) dan seseorang dari Bandung dengan transaksi COD.

Terhadap tersangka dikenakan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara, sesuai dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 245 KUHP.

Melalui kesempatan ini, Kapolresta Sidoarjo mengimbau masyarakat agar lebih teliti dan hati-hati saat bertransaksi. Terlebih lagi jelang Idulfitri marak peredaran pertukaran uang baru. (ud/jok/day)

MEMORANDUM

BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



PANAS: Para mahasiswa saat melakukan aksi demonstrasi dengan membakar ban di depan Gedung DPRD Sidoarjo.

Tolak Pengesahan UU TNI, Mahasiswa Geruduk DPRD dan Bakar Ban

SIDOARJO-Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Sidoarjo menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sidoarjo pada Selasa (25/3). Mereka menolak pengesahan Undang-Undang (UU) TNI yang dinilai bertentangan dengan semangat reformasi.

Pantauan Radar Sidoarjo di lokasi menunjukkan massa tiba sekitar pukul

14.00 WIB dan langsung menggelar aksi teatrikal sebelum berorasi.

Situasi semakin memanas ketika demonstran membakar ban di depan gedung DPRD sebagai bentuk protes. Selain itu, mereka juga melemparkan telur busuk sebagai simbol kekecewaan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.

Ketegangan meningkat saat massa men-

coba menerobos masuk ke dalam gedung dewan. Mereka bersikeras ingin bertemu langsung dengan anggota DPRD guna menyampaikan tuntutan secara langsung.

Salah satu perwakilan aksi, Bagus Adi Prayoga, menyatakan bahwa demonstrasi ini mencerminkan keresahan masyarakat. Menurutnya, pengesahan UU TNI

● Ke Halaman 10

layout: hadi



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Tolak Pengesahan UU TNI,...

berpotensi mengurangi supremasi sipil dan memperkuat dominasi militer dalam kehidupan bernegara.

“Banyak pasal dalam UU TNI yang men- cederai demokrasi. Kami mempertanyakan sikap DPR, ke mana mereka saat rakyat membutuhkan suara mereka?” ujarnya saat diwawancarai Radar Sidoarjo.

Bagus juga menyebutkan bahwa pihaknya berencana mengajukan judi- cial review ke Mahkamah Konstitusi

(MK) guna membatalkan UU tersebut. Selain itu, mereka juga menuntut DPRD Sidoarjo agar segera menanga- ni permasalahan infrastruktur dan ke- tenagakerjaan di daerah.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, me- nyatakan bahwa pihaknya akan men- indaklanjuti aspirasi mahasiswa. Ia berjanji akan mewadahi diskusi untuk mencari solusi atas permasalahan yang diangkat dalam demonstrasi.

“Kami mengapresiasi penyampaian

aspirasi ini dan akan menjadwalkan audiensi bersama mahasiswa pada Se- lasa (8/4) mendatang,” ujarnya.

Terkait tuntutan pembatalan UU TNI, Abdillah menyarankan mahasiswa me- nempuh jalur hukum dengan mengaju- kan gugatan ke MK. Ia juga menekankan pentingnya menjaga prinsip supremasi sipil dalam kehidupan demokrasi.

Aksi unjuk rasa berlangsung hingga sore hari dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian untuk memastikan keamanan dan ketertiban. (sai/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Beranda • Berita •

Berita Daerah

Borong Dua Isu Ratusan Mahasiswa Ngluruk Kantor DPRD Sidoarjo



Redaksi
25 Maret 2025



Sidoarjo, Arjunanusantaranews.com, – Borong dua isu ratusan Mahasiswa ngluruk kantor DPRD Sidoarjo. Lembaga gabungan Mahasiswa yang mengatasnamakan Cipayung Plus Kabupaten Sidoarjo diantaranya dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang telah berunjuk rasa menolak terkait Rancangan Undang- Undang tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Undang- Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI telah sahkan menjadi Undang-Undang, Selasa (25/3/2025) di depan Gedung DPRD Sidoarjo.

Borong dua isu ratusan Mahasiswa ngluruk kantor DPRD Sidoarjo. Dengan ratusan Mahasiswa mendatangi kantor DPRD Sidoarjo tepat pada pukul 13.30 Wib, yang semua mengenakan pakaian warna gelap (hitam) simbol keprihatinan terhadap pemerintahan saat ini. Dengan pertama menyikapi isu Nasional yang telah di sahkannya Undang-Undang TNI dan kedua isu lokal yang ada di daerah Kabupaten Sidoarjo yang perlu diperhatikan.



Unjuk rasa tersebut yang diketuai dari tiga organisasi masing-masing, Dandi Amar Rizki (HMI), Putri Maulidina (PMI) dan Bagus Yoga Aditya (IMM). Dengan membawa satu mobil komando dan beberapa spanduk dengan berbagai tulisan. Sebelum menyampaikan orasi secara bergantian beberapa orang telah melakukan Teatrikal yang menggambarkan kekuasaan, kekerasan, ketidakadilan dan diskriminasi kepada masyarakat sipil.



Orasi dilakukan secara bergantian meminta kepada ketua DPRD Sidoarjo segera menemui, dan aksi demonstrasi sempat memanaskan para Mahasiswa yang tergabung dalam unjuk rasa telah melakukan pembakaran ban dan menyuarakan berkali-kali letusan mercon.

Sebelum Mahasiswa melakukan pembakaran ban, Abdillah Nasih ketua DPRD Sidoarjo sudah menemui para pengunjuk rasa didampingi Zuhlul Yussar dari Komisi D dan Muh. Zakaria Dimas Pratama dari Komisi C di depan pintu gerbang. Namun para Mahasiswa meminta masuk semua ke dalam kantor DPRD Sidoarjo.

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih dengan sigap memberikan ruang pertemuan dengan semua Mahasiswa secara lesehan di depan pintu utama masuk kantor.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Salah satu Ketua organisasi Mahasiswa telah membacakan apa yang menjadi tuntutan dalam Unras tersebut di depan Ketua DPRD Sidoarjo dan anggota komisi yang mendampingi.

Abdillah Nasih telah menanggapi dengan baik dan senang hati secara terbuka. Dan akhirnya telah dilakukan penandatanganan kedua belah pihak, bahwa DPRD akan menjembatani perihal yang menjadi tuntutan dalam unras tersebut.

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyampaikan kepada para awak media bahwa prinsipnya terbuka dan mengapresiasi kepada adik-adik Mahasiswa. Sebagai masukan, kritikan ataupun kebijakan Nasional, regional maupun lokal.

Kami salut dengan teman-teman Mahasiswa sore hari ini, dan juga kami apresiasi karena mereka bisa tertib, kita saling memahami, dan yang paling penting aspirasinya kita sama-sama dengarkan, jelas nya.

Abdillah Nasih pun menyampaikan bahwa tuntutan unras Mahasiswa pada hari ini ada dua isu, Yaitu isu Nasional terkait Undang-Undang TNI dan isu lokal terkait dengan beberapa PR-PR Kabupaten, seperti Sarpras, drainase yang masih rusak, jalan rusak, PJU dan macam-macam. Termasuk kepingin ketemu dengan komisi A, B, C dan D.

Dan Insya Allah pasca cuti nanti akan kita undang Cipayung Plus untuk mendatangkan OPD dan komisi terkait, pungkasnya.





RAMAH PERKOTA

Mahasiswa Bakar Ban Dan Misuh-Misuh Saat Aksi Tolak UU TNI

Liputan Sidoarjo.com



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Demonstrasi yang digelar di depan gedung DPRD Sidoarjo, Selasa (25/3/2025) dilakukan oleh tiga elemen mahasiswa-PMII, GMNI, dan HMI.

Pada demonstrasi menyuarakan kekhawatiran bahwa revisi UU TNI berpotensi melemahkan masyarakat dan menggeser prinsip supremasi sipil.

Sayangnya, aksi ini sedikit diwarnai hal kurang elok dari oknum mahasiswa, yang misuh misuh dengan suara lantang saat di pelataran pintu utama gedung dewan

Sebelumnya, aksi berjalan damai saat orasi digelar yang diawali ketat pihak Kepolisian Resort Kota (Polresta) Sidoarjo.

Namun unjuk rasa mendadak berubah memanas saat aksi teatrikal yang diselingi aksi bakar ban serta pelamparan petasan ke arah gerbang DPRD.

Massa juga sempat mencoba menerobos barikade polisi dan petugas Satpol PP namun berhasil ditahan.

Situasi memanas akhirnya bisa diredam dan terkendali saat Pimpinan DPRD, Abdillah Nasih didampingi sejumlah anggota dewan lainnya bersama Kapolres Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing menemui para demonstrasi.

"Saudara-saudara, Kami ijinkan masuk ke halaman gedung untuk menyampaikan aspirasi damai terkait tuntutan tadi yang disampaikan melalui orasi. Aasikan masuk dengan tertib dan tidak anarkis," teriak Abdillah Nasih disambut tepuk sorai massa aksi.

Dalam kesempatan dialog, Korlap aksi Bagus Adi Prayoga mendesak DPRD menindaklanjuti berbagai permasalahan daerah serta menolak pengesahan UU TNI yang dinilai merugikan rakyat.

"Apa yang kita sampaikan hari ini adalah sejumlah keresahan masyarakat. Banyak kemungkinan perubahan sipil yang sebenarnya seharusnya ada di atas kekuatan militer, namun dengan revisi ini, supremasi sipil seakan akan hilang," ucap Bagus.

Selain menolak revisi UU TNI, demonstrasi juga menuntut agar isu-isu lokal seperti banjir, jalan rusak, dan kesempatan kerja turut dibahas di DPRD. Lebih lanjut, Bagus menegaskan pihaknya akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan UU TNI yang baru disahkan.

"Kami akan mengajukan judicial review ke MK untuk membatalkan UU TNI. Kami juga menuntut DPRD Sidoarjo segera menyelesaikan masalah infrastruktur dan tenaga kerja di daerah," katanya.

Merespon tuntutan tersebut, Abdillah Nasih menyatakan kesigapannya menindaklanjuti isu lokal yang disampaikan mahasiswa. Ia berjanji akan mawadahi dan mencari solusi atas permasalahan yang diangkat dalam aksi tersebut.

"Pada prinsipnya kami terbuka menerima aspirasi adik-adik mahasiswa. Spirit menyampaikan kritikan sebagai bentuk keadilan terhadap kemajuan bangsa sangat kami harapkan," kata Abdillah Nasih. (Abidin)

Liputan Sidoarjo.com

Home > Politik

Ratusan Mahasiswa Sidoarjo Geruduk DPRD, Tolak Revisi UU TNI

Selasa, 25 Maret 2025 | 21:24 | [In Politik](#)

 0



Ratusan mahasiswa Sidoarjo saat menggelar aksi tolak revisi UU TNI di depan Kantor DPRD SidoarjoFoto: Iqung Syariful



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

KOTA, SIDOARJONEWS.id — Ratusan mahasiswa geruduk kantor DPRD Sidoarjo, Selasa (25/03/2025). Mereka membawa sejumlah aspirasi, salah satunya adalah penolak terhadap revisi UU TNI yang baru disahkan belum lama ini.

Aksi gabungan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi PMII, IMM, HMI, GMNI dan perwakilan BEM di Sidoarjo itu kompak mengenakan pakaian serba hitam.

Mereka juga membawa poster bertuliskan "tolak militerisme" dan "tolak Dwi fungsi ABRI dan hentikan kriminalitas gaya baru".

"Pengesahan revisi UU TNI telah melukai hati rakyat. DPR sebagai wakil rakyat harusnya memperjuangkan hak rakyat," sebut Ketum PC PMII Sidoarjo, Putri Maulidina dalam orasinya.

Aksi mahasiswa sempat memanas setelah mahasiswa mendesak aparat keamanan untuk bisa menduduki Kantor DPRD Sidoarjo. Mereka tidak mau hanya ada perwakilan.

Baca Juga : [RSUD Sidoarjo Bakal Bangun Gedung 5 Lantai dengan Dana Pinjaman, Begini Sikap DPRD Sidoarjo](#)

Setelah bernegosiasi cukup lama, akhirnya seluruh massa aksi diperbolehkan masuk di depan lobi kantor dewan. Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih bersama sejumlah anggota dewan duduk bersama mendengar aspirasi dari mahasiswa.

"Dengan disahkannya revisi UU TNI ini sangat berpotensi akan membatasi ruang gerak masyarakat sipil," ucap Ketum PC IMM Sidoarjo, Bagus Yoga Aditya.

Dia juga mempertanyakan fungsi DPR yang dinilai setiap kebijakan cenderung merugikan masyarakat. Menurut Aditya, prinsip dasar bernegara adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

"Namun faktanya meski sudah ada penolakan revisi UU TNI di banyak daerah tetap disahkan," ungkapnya.

"Kami dari mahasiswa Sidoarjo juga akan menuntut di Mahkamah Konstitusi atas pengesahan revisi UU TNI ini," tambahnya.



Sementara, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih mengapresiasi aksi mahasiswa yang berlangsung secara damai.

■ Dia menegaskan, akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ini sesuai dengan aturan yang berlaku. "Kami terbuka atas aspirasi dari mahasiswa, tentu hal ini akan kami sampaikan sesuai aturan yang berlaku," pungkasnya. (Ipung)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Home > Sidoarjo > Demo Tolak UU TNI di Sidoarjo, Ratusan Mahasiswa Masuki Kantor DPRD

Sidoarjo

Demo Tolak UU TNI di Sidoarjo, Ratusan Mahasiswa Masuki Kantor DPRD

by redaksiWID | 25/03/2025 | 0 | 80

SHARE



Suasana demo Tolak UU TNI di Depan Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo, Selasa (25/3/2025).

SIDOARJO (wartadigital.id) – Ratusan mahasiswa yang terdiri tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sidoarjo dengan tegas menolak pengesahan UU TNI di Depan Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo, Selasa (25/3/2025). Sejak pukul 10.00 WIB, Organisasi Cipayung dan Aliansi Mahasiswa Sidoarjo ini menggelar orasi yang menyatakan bahwa UU TNI itu cacat baik secara formil maupun materil.

Koordinasi Lapangan Organisasi Cipayung dan Aliansi Mahasiswa Sidoarjo, Mohammad Farhan menjelaskan keterlibatan militer dalam urusan sipil dapat meningkatkan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa insiden di masa lalu menunjukkan bahwa tanpa mekanisme akuntabilitas yang transparan, pendekatan militer dalam menangani isu-isu sipil sering kali mengabaikan prinsip-prinsip HAM dan keadilan.

"Rancangan RUU TNI harusnya dilakukan secara transparan nyatanya dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan masyarakat sipil, akademisi maupun organisasi hak asasi manusia," ungkap Farhan di depan Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo, Selasa (25/3/2024) sore.



Sejak pukul 10.00, Organisasi Cipayung dan Aliansi Mahasiswa Sidoarjo berorasi di depan kantor DPRD hingga melakukan pembakaran ban bekas dan menyalakan petasan hingga merangsek dan menuntut untuk masuk ke dalam gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo.



Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Masih menerima pendemo dari Organisasi Cipayung dan Aliansi Mahasiswa Sidoarjo dengan mendengarkan dan bersedia menandatangani surat tuntutan dari mahasiswa.

Pukul 15.40, ratusan mahasiswa bisa masuk ke halaman kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo dan diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih didampingi oleh Komisi D Zahrul Yusaar dan Komisi C Muh. Zakaria Dimas Pratama. Di depan Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Korlap Organisasi Cipayung dan Aliansi Mahasiswa Sidoarjo Farhan mengatakan tuntutan mereka, ada dua tuntutan yaitu tuntutan masalah nasional dan tuntutan masalah lokal Sidoarjo.

"Ada 7 tuntutan masalah nasional, antara lain kami menolak pengesahan UU TNI yang melegitimasi peran TNI di ruang sipil, menuntut DPR untuk segera mempublish naskah pengesahan RUU TNI, menuntut pengesahan RUU perampasan aset," ujar Farhan yang membacakan tujuh tuntutan Organisasi Cipayung dan Aliansi Mahasiswa Sidoarjo sambil duduk lesehan bersama Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo di halaman Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sedang untuk tuntutan lokal, lanjut Farhan, ada lima tuntutan, yaitu mendesak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk segera menyelesaikan masalah PUJ di lingkaran timur, mendesak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk segera melakukan perbaikan infrastruktur drainase, mendesak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk segera membuat kebijakan penerimaan karyawan 80 persen untuk masyarakat Sidoarjo dan 20 persen untuk masyarakat di luar Sidoarjo, mendorong Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan tindakan kepada perusahaan swasta yang menyalahi prosedural pengelolaan air limbah dan menuntut Komisi A, B, C dan D merespon dan memberi tanggapan terhadap masalah yang ada di Kabupaten Sidoarjo mengingat sudah 6 bulan aktif pasca pelantikan.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdilah Masih menerima pendemo dari Organisasi Cipayung dan Aliansi Mahasiswa Sidoarjo dengan mendengarkan dan bersedia menandatangani surat tuntutan dari mahasiswa. "Pada prinsipnya kami terbuka dan memberikan apresiasi kepada para mahasiswa untuk memberikan kritikan masukan dari setiap kebijakan baik di level Kabupaten Sidoarjo maupun nasional," jelas Nasih kepada reporter warta digital.id pasca menerima para pendemo.

Yang paling penting sambung Nasih, aspirasi dari para mahasiswa ini didengar dan ditampung. Untuk kritikan dan masukan kebijakan di level nasional, tentunya pihaknya akan meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun untuk kritikan dan masukan akan kebijakan di level Kabupaten Sidoarjo, pihaknya akan segera memfasilitasi keinginan mahasiswa untuk hearing dengan beberapa dinas.

"Mereka (mahasiswa pendemo, red) mendesak untuk hearing dengan dinas-dinas terkait seperti dalam tuntutan lokal, dan kami akan memfasilitasi setelah libur lebaran. InsyaAllah 8 April 2025 mendatang," pungkasnya. sis

